

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

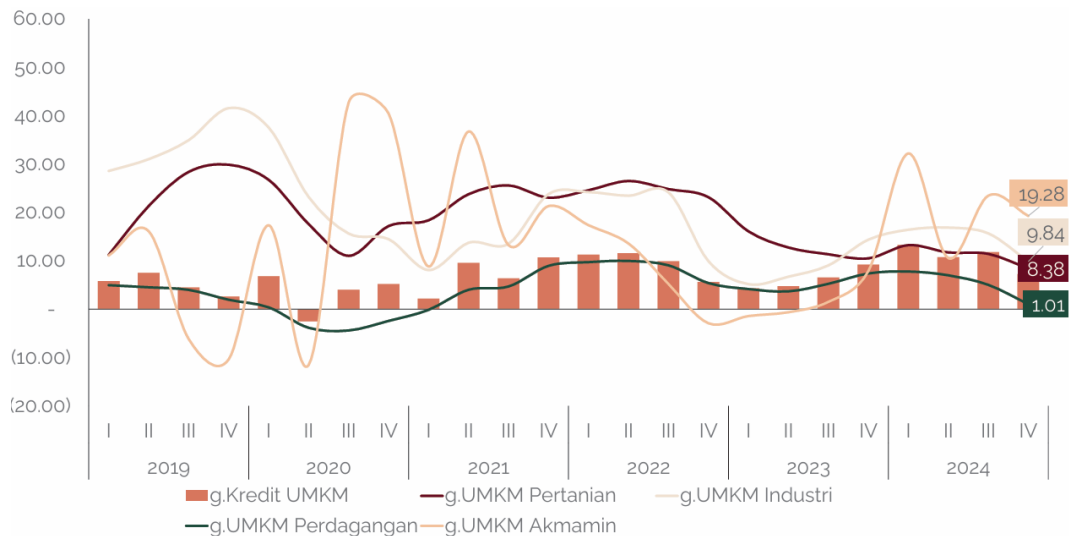
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, per Desember 2024 sektor UMKM mendominasi usaha nasional, dengan jumlah mencapai 65,5 juta unit usaha atau setara 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. UMKM dipandang sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, utamanya dalam menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah kecil (Sihombing & Masdiantini, 2025). Bahkan, lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh UMKM jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh usaha berskala besar (Pradnyani & Yuniarta, 2024). Menurut Fitrianita & Sinarwati (2024) sektor UMKM merupakan *critical engine* atau motor penggerak utama dalam memajukan perekonomian di kawasan-kawasan daerah di Indonesia.

Kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia pun sangat nyata. Sektor ini tercatat menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai mencapai Rp 9.300 triliun serta menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia (Aprilia dkk., 2025; Dewi, 2025). Selain itu, UMKM juga berperan dalam peningkatan investasi nasional dan penciptaan devisa negara. Dalam bidang ekspor, UMKM berkontribusi sekitar 15% terhadap ekspor nonmigas, terutama dari sektor makanan, kerajinan tangan, dan produk tekstil (Helmy dkk., 2025). Bahkan,

data menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2022 hingga 2024, jumlah dan aktivitas UMKM terus mengalami peningkatan yang konsisten. Hal ini mencerminkan bahwa UMKM memiliki potensi dan peran vital sektor ini dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meskipun UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional, salah satu tantangan yang kerap dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan modal atau pendanaan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki (Mutuari & Yudiantara, 2021). Modal adalah elemen esensial dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis (Liantifa, 2023). Namun, tidak semua pelaku UMKM memiliki sumber modal pribadi yang memadai untuk menopang aktivitas usahanya. Padahal, pendanaan sangat memengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (Munandar, 2016). Dalam hal inilah, kehadiran pihak ketiga sebagai lembaga penyedia modal menjadi sangat krusial dalam menyediakan pembiayaan.

UMKM perlu terus didorong dan dibantu mengatasi berbagai kelemahannya agar mampu bersaing (Purnamawati dkk, 2024). Dalam upaya memperkuat daya saing tersebut, pelaku UMKM perlu memanfaatkan sumber dana lain, termasuk melalui pinjaman atau utang (Pradnyawati & Sulindawati, 2023). Guna mendukung kebutuhan ini, pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil langkah strategis, seperti melalui penerbitan Peraturan BI No. 14/22/PBI/2022 yang mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan bagi UMKM, serta peluncuran program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah dan subsidi bunga bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 lalu (Purnamawati & Yuniarta, 2021). Upaya ini menunjukkan adanya dukungan kuat terhadap penguatan struktur keuangan UMKM, sehingga mereka dapat berkembang lebih optimal.



**Gambar 1.1**  
Perkembangan Kredit UMKM Sektoral Provinsi Bali  
(Sumber: Bank Indonesia, 2025)

Dari Gambar 1.1 terkait perkembangan kredit UMKM sektoral di Provinsi Bali, dapat dilihat bahwa secara umum tren kredit UMKM di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan tingginya minat pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam menyediakan skema pembiayaan seperti KUR dan subsidi bunga. Data ini mengindikasikan bahwa semakin banyak UMKM di Provinsi Bali yang mengambil keputusan untuk mengakses kredit sebagai sumber modal dalam proses pengembangan usahanya.

Utang dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang krusial bagi UMKM. Namun, apabila tidak dikelola secara bijak, utang justru dapat menjadi hambatan yang memperlambat perkembangan usaha (Shaferi & Handayani, 2013). Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah lemahnya pengelolaan keuangan dan ketidaktepatan dalam pengambilan kredit. Kondisi ini kerap berujung pada ketidakmampuan membayar angsuran pinjaman yang berakhir pada kredit macet (Ruscitasari dkk., 2022). Kredit macet atau *Non Performing Loan*

(NPL) merupakan kondisi kredit bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas dan kesehatan lembaga perbankan, karena debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam periode yang telah disepakati (Rabbani & Rahadian, 2022). Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2025), berikut adalah persentase perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) UMKM di Provinsi Bali.

**Tabel 1.1**  
Persentase Perkembangan NPL UMKM Provinsi Bali

Kabupaten/ Kota	NPL (%)									
	2022		2023				2024			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Denpasar	3.59	2.88	3.25	3.01	2.73	2.49	2.18	2.62	2.68	1.96
Badung	3.10	2.51	1.59	2.46	1.80	1.65	1.42	1.16	1.00	0.80
Gianyar	0.85	0.65	0.69	1.77	1.80	0.87	0.81	0.83	0.80	0.60
<b>Buleleng</b>	<b>4.48</b>	<b>4.04</b>	<b>3.73</b>	<b>3.01</b>	<b>3.03</b>	<b>2.99</b>	<b>2.77</b>	<b>2.95</b>	<b>3.12</b>	<b>2.58</b>
Tabanan	1.96	1.70	1.89	1.43	1.87	1.88	1.85	1.80	1.53	1.19
Karangasem	4.47	3.75	4.12	3.91	3.58	3.07	2.82	3.12	2.67	1.61
Jembrana	2.01	1.59	2.16	1.16	0.93	0.65	1.87	2.95	2.82	2.19
Bangli	1.32	1.12	1.67	1.15	1.23	0.47	0.65	0.52	0.62	0.30
Klungkung	4.32	4.18	4.33	3.95	4.15	0.97	1.14	2.67	1.22	1.12
<b>Rata-Rata</b>	<b>2.99</b>	<b>2.51</b>	<b>2.54</b>	<b>2.50</b>	<b>2.37</b>	<b>1.92</b>	<b>1.82</b>	<b>2.05</b>	<b>1.92</b>	<b>1.43</b>

(Sumber: Bank Indonesia, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 terkait persentase perkembangan NPL UMKM, dari total sembilan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng secara konsisten menunjukkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang cukup tinggi. Meskipun selama 2022 hingga 2024 sempat mengalami penurunan dalam beberapa periode, angka NPL Kabupaten Buleleng masih menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain dan selalu melebihi angka rata-rata provinsi. Bahkan pada kuartal III tahun 2024, angka NPL di Kabupaten Buleleng kembali meningkat menjadi 3,12% sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali menjadi 2,58% di kuartal IV 2024.

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Bali, sehingga menyebabkan banyaknya pula jumlah pelaku UMKM yang berkembang di kabupaten ini (Purnamawati dkk., 2023). Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng sendiri banyak mengandalkan kredit sebagai sumber permodalan untuk menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha, mengingat keterbatasan modal internal masih menjadi masalah (Cahyadi & Diatmika, 2021). Meningkatnya jumlah UMKM di Buleleng juga berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pengambilan kredit oleh pelaku UMKM tersebut (Putri & Dewi, 2022). Namun, tingginya jumlah pengambilan kredit tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan pengelolaan keuangan pelaku UMKM yang memadai. Bahkan, pada tahun 2023 UMKM di Kabupaten Buleleng tercatat mengalami penurunan penjualan rata-rata sebesar 61% yang menunjukkan bahwa memang terdapat kendala pada UMKM dalam melakukan pengembalian kredit (Noviyanti & Diatmika, 2025).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa meskipun telah terdapat berbagai upaya dari pemerintah dan Bank Indonesia dalam meningkatkan akses dalam pemberian pembiayaan, pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng justru masih menghadapi tantangan dalam mengelola kewajiban kreditnya. Tingginya tingkat NPL mengarah pada potensi lemahnya manajemen keuangan dan pengambilan keputusan yang kurang tepat terkait utang. Kelemahan dalam pengambilan keputusan kredit ini dapat berujung kepada ketidakmampuan membayar kembali pinjaman (gagal bayar) yang berkontribusi pada meningkatnya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) (Martadinata & Pasek, 2024).

Di satu sisi, pengambilan kredit dapat memberikan dorongan pertumbuhan melalui pendanaan modal kerja dan investasi. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola secara hati-hati, utang dapat menjadi beban finansial yang dapat menghentikan laju pertumbuhan usaha (Ananda & Rasyid, 2024). Dalam pengambilan keputusan keuangan, individu kerap kali menghadapi keterbatasan dalam kemampuan berpikir dan informasi yang tidak lengkap, sehingga keputusan yang diambil kerap dipengaruhi oleh faktor psikologis dan perilaku individu (Pracoyo dkk., 2025).

Penelitian ini didasarkan pada *prospect theory* dan *behavioral finance theory* untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Peningkatan NPL dan berbagai permasalahan kredit mengindikasikan bahwa banyak pelaku UMKM di Buleleng menghadapi kendala dalam mengambil keputusan kredit yang tepat di awal. Hal ini tercermin dari kecenderungan pengambilan keputusan yang kurang rasional, seperti tidak mempertimbangkan risiko secara matang maupun kemampuan pembayaran sebelum mengajukan pinjaman (Setiawan & Kumara, 2024). Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh pelaku UMKM yang belum memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan dan mempertimbangkan aspek keuangan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan kredit (Nobriyani & Haryono, 2019).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan kepada lima belas orang pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, sebagian besari dari mereka menyatakan bahwa keputusan mereka dalam mengambil kredit umumnya didasari oleh kebutuhan mendesak akan modal usaha, tanpa analisis kelayakan yang mendalam. Sebagian besar mengaku mengambil pinjaman karena merasa tidak ada pilihan lain, bukan karena sudah memiliki rencana penggunaan dan pengembalian yang jelas. Beberapa informan bahkan menyebutkan bahwa pinjaman yang mereka ambil

justru menjadi beban baru karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha. Tidak sedikit pula yang mengakui pernah mengalami kesulitan membayar cicilan, yang umumnya disebabkan oleh pendapatan usaha yang tidak sesuai harapan, penggunaan dana yang tidak fokus pada hal produktif, atau kurang disiplinnya pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kredit yang kurang tepat menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya angka kredit macet di pelaku UMKM Kabupaten Buleleng.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, sangat penting bagi pelaku UMKM untuk memperbaiki praktik manajemen keuangan agar mampu mengalokasikan sumber daya lebih efektif, memanfaatkan pinjaman secara optimal, serta menekan risiko kredit macet. Namun, dalam praktiknya, keputusan keuangan tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis semata, melainkan juga dipengaruhi oleh cara individu memersepsikan risiko dan manfaat dari keputusan yang telah diambil. *Prospect theory* menjelaskan bahwa individu cenderung mengevaluasi keputusan berdasarkan persepsi keuntungan dan kerugian yang dirasakan, bukan semata-mata pada perhitungan rasional yang objektif.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng kerap menitikberatkan pada manfaat jangka pendek dibandingkan risiko jangka panjang berupa kewajiban pembayaran. Dalam konteks tersebut, perilaku keuangan (*behavioral finance*) menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana kesalahan kognitif dan emosi memengaruhi proses pengambilan keputusan keuangan (Sukandani dkk., 2019). Dengan demikian, keputusan keuangan pelaku UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh aspek rasional, tetapi juga oleh persepsi, sikap, dan kontrol individu terhadap keuangan yang dimilikinya.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengambil keputusan kredit pelaku UMKM adalah *financial attitude*. *Financial attitude* atau sikap keuangan adalah cara pandang individu dalam menghadapi keputusan-keputusan finansial, seperti dalam hal pengelolaan uang, investasi, utang, dan menabung. Seseorang dengan *financial attitude* yang positif dan tepat cenderung mampu menyusun perencanaan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan di masa mendatang (Nisa & Haryono, 2022). *Financial attitude* juga memengaruhi cara individu dalam menggunakan, menyimpan, mengakumulasi, hingga mengeluarkan uang (Sandi dkk., 2020). Ketika seseorang hati-hati dalam mengelola utang, maka potensi terjadinya kredit bermasalah akan lebih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara awal, diketahui bahwa pengambilan keputusan kredit oleh pelaku UMKM sangat dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap utang. Bapak GM, pemilik warung kelontong, memandang kredit sebagai solusi cepat yang wajar dan tidak berisiko besar bagi keberlangsungan usahanya.

“Kalau usaha lagi butuh modal, ya kredit itu sudah biasa sih. Selama usaha jalan, bapak ngerasa pasti bisa bayar, jadi nggak terlalu khawatir lah soal risikonya. Dari dulu bapak udah beberapa kali minjem dan ya nggak terlalu lah membebani ya. Ya emang sih kita gatau kedepannya kayak gimana”

(Sumber: Wawancara awal dengan Bapak GM, Pelaku UMKM).

Cara pandang tersebut menunjukkan sikap keuangan yang cenderung optimistis berlebihan, di mana kredit dipersepsikan sebagai hal yang aman tanpa mempertimbangkan kemungkinan kondisi usaha yang tidak stabil. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Bapak PG, pemilik usaha kerajinan tangan, yang menilai bahwa mengambil kredit merupakan langkah yang hampir tidak dapat dihindari dalam menjalankan usaha. Ia menyatakan,

“Kalau menurut saya, selama ada peluang usaha, ambil kredit itu bukan masalah besar toh juga kan itu kita pakaikan untuk jalannya usaha yang yah nanti balik lagi gitu lah istilahnya. Soal cicilan, nanti bisa disesuaikan sambil kita menjalankan usahanya kayak bapak. Ya istilahnya uangnya muter gitu terus, keuntungannya kan kita puter-puter lagi itu”

*(Sumber: Wawancara awal dengan Bapak PG, Pelaku UMKM).*

Pernyataan tersebut mencerminkan *financial attitude* yang kurang berhati-hati, di mana keputusan kredit didasarkan pada keyakinan subjektif dan harapan terhadap kondisi usaha di masa depan, bukan pada pertimbangan risiko secara menyeluruh. Cara pandang seperti ini berpotensi mendorong pelaku UMKM dalam melakukan pengambilan keputusan kredit usaha tanpa evaluasi yang matang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban kredit dan meningkatkan risiko gagal bayar, sebagaimana tercermin dalam tingginya angka NPL di Kabupaten Buleleng.

Fenomena tingginya NPL UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dipandang sebagai refleksi dari lemahnya sikap keuangan pelaku UMKM dalam melakukan pengambilan keputusan kredit. Cara pandang yang cenderung memandang kredit sebagai solusi yang aman dan wajar, tanpa disertai perencanaan keuangan yang matang dan perhitungan risiko, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kemampuan usaha dan kewajiban pembayaran kredit. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM tetap mengambil kredit meskipun kapasitas arus kas usaha belum sepenuhnya stabil. Akibatnya, ketika terjadi penurunan pendapatan atau gangguan usaha, pelaku UMKM kesulitan memenuhi kewajiban angsuran, yang pada akhirnya tercermin dalam tingginya tingkat NPL UMKM di Kabupaten Buleleng dibandingkan daerah lain di Provinsi Bali.

Dalam perspektif *prospect theory* dan *behavioral finance*, *financial attitude* berperan penting dalam membentuk cara individu memersepsikan risiko dan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Pelaku UMKM dengan *financial attitude* yang kurang berhati-hati cenderung membingkai kredit sebagai peluang keuntungan tanpa memberikan bobot yang seimbang terhadap potensi kerugian, seperti risiko gagal bayar. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan kredit tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan dipengaruhi oleh cara pandang dan keyakinan individu. Dengan demikian, *financial attitude* menjadi faktor kunci dalam menjelaskan mengapa sebagian pelaku UMKM tetap mengalami kredit bermasalah meskipun akses pembiayaan tersedia, sebagaimana tercermin dalam fenomena NPL UMKM di Kabupaten Buleleng.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novianti & Salam (2021) menyatakan bahwa *financial attitude* berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan pelaku UMKM di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir. Hidayati dkk. (2020) juga menyatakan hal serupa, bahwa sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan keuangan pada pemilik UKM industri gerabah di Pulau Lombok. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa *financial attitude* atau sikap keuangan yang baik dapat mendorong keberanian dan ketepatan dalam mengelola serta mengambil keputusan keuangan. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Sari dkk. (2020) yang menyatakan bahwa *financial attitude* tidak berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pelaku UMKM *fashion* di Kota Batu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap keuangan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik sektor usaha dan konteks lokal pelaku UMKM.

Berikutnya adalah variabel *mental accounting* yang menggambarkan cara individu secara sadar maupun tidak sadar mengelompokkan uang ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan asal maupun tujuan penggunaannya. Dalam praktiknya, hal ini memengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan keuangan, seperti membedakan antara uang untuk kebutuhan pokok, hiburan, atau tabungan. Thaler (1999) menyebut *mental accounting* sebagai proses kognitif di mana individu menciptakan akun mental yang memisahkan uang berdasarkan sumber atau pemanfaatannya. Konsep ini erat kaitannya dengan teori *behavioral finance*, yang menyoroti bahwa pengambilan keputusan keuangan tidak selalu rasional, melainkan sering kali dipengaruhi oleh aspek psikologis dan kognitif.

*Mental accounting* merupakan salah satu bentuk bias perilaku dalam keuangan, di mana individu memperlakukan uang secara berbeda tergantung pada konteks mentalnya, bukan berdasarkan nilai ekonomis uang secara keseluruhan. Menurut Pasek (2024) *mental accounting* dapat memengaruhi respons seseorang terhadap situasi untung atau rugi dalam keuangan. Heath & Soll (1996) menyatakan bahwa individu cenderung lebih dapat menerima kerugian jika kerugian tersebut berada dalam akun mental tertentu, dibandingkan jika kerugian itu dianggap mengurangi total kekayaan. Artinya, pembentukan akun mental dapat mengaburkan persepsi nilai uang secara objektif, dan mendorong pengambilan keputusan yang menyimpang dari prinsip rasionalitas keuangan khususnya pada pelaku UMKM.

*Mental accounting* berkontribusi terhadap tingginya NPL UMKM, terutama ketika pelaku usaha cenderung memisahkan dana pinjaman ke dalam kategori mental yang keliru, seperti menganggap pinjaman sebagai tambahan pendapatan alih-alih kewajiban. Pola pikir ini menyebabkan penggunaan dana yang tidak sesuai

tujuan produktif dan memperbesar risiko gagal bayar. Sesuai pandangan *behavioral finance theory*, keputusan keuangan dipengaruhi oleh cara individu menyusun dan memaknai informasi secara subjektif (Pasek, 2024), sehingga *mental accounting* penting dalam mencegah kesalahan keputusan utang.

Berdasarkan wawancara awal, *mental accounting* pada pelaku UMKM tercermin dari perilaku nyata dalam mengelola dan menggunakan dana pinjaman setelah keputusan kredit diambil. Kak JY, pemilik usaha makanan, mengungkapkan bahwa dana kredit yang diterima tidak dikelola secara terpisah dari dana usaha lainnya. Ia menyatakan,

“Kalau uang dari pinjaman ngga langsung kak campur sama uang jualan sih. Cuma ya kadang kan kita gatau ada aja kebutuhan yang mendadak atau diluar estimasi kita, ya kak jadinya kadang ambil dari situ juga, ya juga kan usahanya kecil-kecilan punya kak aja.”

(Sumber: Wawancara awal dengan Kak JY, Pelaku UMKM).

Perilaku tersebut menunjukkan tidak adanya pemisahan penggunaan dana berdasarkan tujuan awal pinjaman, sehingga alokasi dana menjadi tidak terkontrol. Perilaku serupa juga ditunjukkan oleh Bu AL, pemilik usaha jus buah, yang menggunakan dana pinjaman secara fleksibel tanpa pembatasan yang jelas. Ia mengungkapkan bahwa

“Kalau ada kebutuhan mendesak di rumah, tak pakai dulu uang yang dari kredit itu, nanti kalau ada lebih baru saya tutup lagi. Soalnya kadang suka kecampur juga kan dia masuk ke dompet kita, jadi dia kecampur lah gitu. Tapi yang nominalnya kecil-kecil aja, ya ga keliatan banget lah signifikan gitu. Saya mikirnya juga ya aman aja lah, kan uang kita juga.”

(Sumber: Wawancara awal dengan Bu AL, Pelaku UMKM).

Fenomena praktik *mental accounting* yang tidak tepat sebagaimana tercermin dari hasil wawancara awal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan tingginya tingkat NPL UMKM di Kabupaten Buleleng. Ketika dana pinjaman tidak dikelola

secara terpisah dan digunakan secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan di luar tujuan usaha, arus kas usaha menjadi sulit dikendalikan. Akibatnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan produktif dan menghasilkan pendapatan guna membayar kewajiban kredit justru terpakai untuk kebutuhan lain yang tidak memberikan pengembalian finansial langsung terhadap kredit yang telah diambil. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidaksesuaian antara kemampuan pembayaran dan besarnya kewajiban kredit, sehingga pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng sangat rentan mengalami keterlambatan pembayaran, bahkan gagal bayar, sebagaimana yang telah tercermin dalam tingginya angka NPL UMKM yang tercatat pada UMKM di Kabupaten Buleleng.

Dalam *prospect theory* dan *behavioral finance theory*, *mental accounting* menjelaskan bagaimana pelaku UMKM membingkai dana pinjaman secara subjektif dalam akun mental tertentu, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya rasional. Dana kredit yang dipersepsikan sebagai “uang tambahan” atau “uang yang bisa digunakan sementara” membuat pelaku UMKM kurang sensitif terhadap potensi kerugian jangka panjang, seperti beban cicilan dan tekanan likuiditas. Individu cenderung lebih fokus pada manfaat jangka pendek yang dirasakan, dibandingkan konsekuensi finansial di masa depan. Pola pikir ini menunjukkan bahwa bias *mental accounting* dapat melemahkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang, sehingga keputusan kredit yang telah diambil berdampak buruk di masa mendatang. Dengan demikian, *mental accounting* menjadi salah satu faktor psikologis penting yang dapat menjelaskan munculnya kredit bermasalah pada UMKM, khususnya pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasek (2024) menyatakan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Pemilik UMKM cenderung memisahkan pengeluaran ke dalam akun mental berdasarkan tujuan tertentu, meskipun kadang tidak rasional, namun dapat membantu fokus dalam pengelolaan risiko keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Laksmana (2024) menunjukkan bahwa *mental accounting* yang merupakan salah satu bentuk perilaku keuangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan keuangan dan menurunkan kualitas keputusan keuangan pada UMKM di Provinsi Bali. Di sisi lain, penelitian Sabarullah (2020) menunjukkan bahwa *mental accounting* tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja UMKM.

Hal ketiga yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan kredit adalah *overconfidence bias*, yaitu kepercayaan diri berlebihan yang dapat menyebabkan irasionalitas dalam pengambilan keputusan (Laksamana, 2024). Individu yang *overconfident* sering mengabaikan risiko eksternal seperti perubahan ekonomi dan cenderung mengelola keuangan secara ceroboh, misalnya dengan melakukan pengeluaran berlebihan atau pengalokasian dana yang tidak tepat (Devi & Pranata, 2024). Sikap *overconfidence bias* dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengambil keputusan keuangan yang terlalu optimis, seperti mengajukan pinjaman dalam jumlah besar tanpa perhitungan matang terhadap kemampuan membayar (Smith dkk., 2024). Mereka cenderung meyakini bahwa usahanya akan terus berkembang dan bergantung pada pendapatan masa depan yang tidak pasti (Devi & Pranata, 2024). Keyakinan berlebih ini sering kali mengabaikan potensi risiko dan ketidakpastian, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang realistis.

Berdasarkan wawancara awal, *overconfidence bias* pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng terlihat dari keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan melunasi utang, meskipun dihadapkan pada kondisi usaha yang tidak selalu stabil. Bapak AR, pemilik usaha bengkel, menyampaikan bahwa dirinya merasa cukup yakin mampu membayar kewajiban kredit yang telah diambil. Ia menyatakan,

“Kalau soal bayar cicilan sih saya yakin bisa. Usaha saya dari dulu jalan terus, walaupun kadang sepi, tapi pasti ada aja masuk. Jadi pas ambil kredit, saya ga terlalu mikir risiko yang berat-berat, yang penting usahanya jalan dulu.”

(Sumber: Wawancara awal dengan Bapak AR, Pelaku UMKM).

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya keyakinan berlebihan terhadap keberlanjutan pendapatan usaha, tanpa mempertimbangkan kemungkinan penurunan omzet atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sikap ini menunjukkan kecenderungan pelaku UMKM untuk mengandalkan optimisme pribadi dalam mengevaluasi keputusan kredit yang telah diambil. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ibu NS, pemilik usaha pakaian, yang menilai bahwa kemampuan mengelola usaha yang dimilikinya sudah cukup untuk menanggung beban pinjaman. Ia mengungkapkan bahwa,

“Saya dari awal yakin bisa ngatur semuanya. Selama ini juga usaha bisa nutup kebutuhan, jadi saya rasa bunga sama cicilan kredit itu masih bisa ditangani. Kalau nanti ada kendala, ya dipikirkan sambil jalan kayak waktu Covid itu, ya syukurnya ya masih bisa kita berdiri sampai sekarang kan.”

(Sumber: Wawancara awal dengan Ibu NS, Pelaku UMKM).

Pernyataan tersebut menunjukkan *overconfidence bias* dalam menilai kemampuan diri sendiri, di mana risiko kredit dipersepsikan sebagai hal yang dapat diatasi di kemudian hari tanpa perencanaan yang matang sejak awal. Keyakinan seperti ini berpotensi mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng

melakukan pengambilan keputusan kredit berdasarkan ekspektasi yang terlalu optimis, sehingga meningkatkan risiko ketidaksesuaian antara proyeksi pendapatan dan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi.

Fenomena *overconfidence bias* ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tingginya tingkat NPL UMKM di Kabupaten Buleleng. Pelaku UMKM yang terlalu percaya diri cenderung meremehkan risiko gagal bayar dan mengabaikan kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan usaha. Akibatnya, keputusan kredit yang telah direalisasikan tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan risiko yang memadai. Ketika realisasi pendapatan tidak sesuai dengan ekspektasi awal, pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya angka kredit bermasalah.

Dalam *prospect theory* dan *behavioral finance theory*, *overconfidence bias* menjelaskan kecenderungan individu untuk memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan terhadap kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Individu dengan *overconfidence bias* cenderung berfokus pada potensi keuntungan dan keberhasilan usaha di masa depan dibandingkan dengan kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM menjadi kurang mempertimbangkan risiko secara objektif dalam proses pengambilan keputusan kredit, serta lebih yakin bahwa keputusan yang diambil sudah tepat. Akibatnya, pelaku UMKM cenderung mengambil keputusan kredit tanpa melakukan pertimbangan yang matang terhadap berbagai kemungkinan, termasuk kemampuan pembayaran kembali dan kondisi usaha di masa mendatang. Keyakinan yang berlebihan tersebut mendorong individu untuk menilai bahwa risiko dapat dikendalikan oleh kemampuan pribadi, sehingga keputusan kredit yang diambil menjadi kurang rasional.

Penelitian Ananda & Rasyid (2024) menyatakan bahwa *overconfidence* berpengaruh positif terhadap keputusan keuangan dalam pengambilan hutang Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Padang. Purnamasari, dkk. (2025) juga menyatakan hal serupa, bahwa sikap *overconfidence* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan keuangan UMKM di Kota Bandung. Didukung pula oleh penelitian yang sama oleh Hidayati dkk. (2022) dan Anggraeni dkk. (2021). Semakin besar keyakinan mereka terhadap kemampuan diri, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk mengambil pinjaman. Namun, penelitian Laksana (2024) menyatakan *overconfidence* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan keuangan UMKM di Provinsi Bali. Sementara itu Purwidianti dkk. (2023) menyatakan bahwa *overconfidence* tidak berpengaruh terhadap keputusan keuangan UKM di Kabupaten Banyumas.

Tingginya angka NPL pada UMKM di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan mendasar dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam pengambilan keputusan kredit. Meskipun berbagai dukungan pemerintah melalui skema pembiayaan seperti KUR telah tersedia, masih banyak pelaku usaha yang gagal memanfaatkan dana tersebut secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada aspek teknis, melainkan juga menyangkut dimensi psikologis dan perilaku keuangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mengaitkan variabel-variabel perilaku seperti *financial attitude*, *mental accounting*, dan *overconfidence bias* untuk memahami lebih dalam bagaimana pelaku UMKM membuat keputusan kredit, serta bagaimana bias perilaku tersebut dapat memicu kesalahan dalam pengelolaan utang yang berujung pada kredit macet.

Penelitian ini menggunakan *financial attitude*, *mental accounting*, dan *overconfidence bias* sebagai variabel independen untuk menjelaskan pengambilan keputusan kredit UMKM di Kabupaten Buleleng. Ketiga variabel tersebut dipilih karena merepresentasikan dimensi psikologis yang saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan kredit, mulai dari cara pandang terhadap utang (*financial attitude*), perilaku pengalokasian dana (*mental accounting*), hingga tingkat keyakinan subjektif berlebih (*overconfidence bias*). Dengan *prospect theory* dan *behavioral finance theory* menjadikan penelitian ini relevan secara empiris dan praktis dalam menjelaskan fenomena kredit UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan latar belakang permasalahan, *research gap*, keterbaharuan, dan urgensi penelitian maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Attitude*, *Mental Accounting*, dan *Overconfidence Bias* terhadap Pengambilan Keputusan Kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut.

1. Kredit macet masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Hal ini tercermin dari peningkatan angka *Non-Performing Loan* (NPL) dari 2,77% pada triwulan I menjadi 3,12% pada triwulan III tahun 2024, menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah dengan rasio NPL UMKM tertinggi di Provinsi Bali. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan pinjaman oleh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.

2. *Financial attitude* pelaku UMKM masih rendah, tercermin dari pengambilan pinjaman tanpa pertimbangan matang, minimnya pencatatan keuangan, dan kurangnya kebiasaan menyiapkan tabungan. Sikap ini menyebabkan keputusan utang diambil secara impulsif dan berisiko menimbulkan kredit macet.
3. Terdapat kecenderungan *mental accounting* yang keliru, di mana dana pinjaman dianggap sebagai tambahan pemasukan dan digunakan juga untuk konsumsi pribadi. Hal ini membuat penggunaan dana tidak sesuai tujuan dan meningkatkan risiko gagal bayar.
4. *Overconfidence bias* juga ditemukan, di mana pelaku UMKM terlalu optimis terhadap prospek usaha dan mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan realistis terhadap kemampuan bayar. Ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kondisi nyata turut mendorong terjadinya kredit macet.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah ditetapkan untuk menjaga agar ruang lingkup kajian tetap terfokus. Penelitian ini hanya membatasi permasalahan pada tiga variabel utama, yaitu *financial attitude*, *mental accounting*, dan *overconfidence bias* terhadap pengambilan keputusan kredit oleh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Fokus utama diarahkan pada bagaimana ketiga faktor tersebut memengaruhi cara pelaku usaha mengambil keputusan kredit. Pembatasan ini juga mempertimbangkan hasil wawancara awal yang menunjukkan bahwa kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) di kalangan UMKM tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek psikologis dan perilaku keuangan individu.

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apakah *financial attitude* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah *mental accounting* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah *overconfidence bias* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial attitude* terhadap pengambilan keputusan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh *mental accounting* terhadap pengambilan keputusan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh *overconfidence bias* terhadap pengambilan keputusan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng.

#### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

##### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori mengenai hubungan *financial attitude*, *mental accounting*, dan *overconfidence bias*

terhadap pengambilan keputusan kredit pada UMKM. Hasil penelitian ini nantinya akan memperkuat atau mematahkan argumen teori sebelumnya yang sudah ada. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan pada UMKM, khususnya dalam konteks pengambilan kredit.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Pelaku UMKM**

Hasil penelitian ini dapat membantu pelaku UMKM memahami bias psikologis yang memengaruhi cara mereka mengelola keuangan. Dengan pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu membuat keputusan kredit yang lebih rasional dan terukur, meminimalkan risiko kegagalan usaha, serta meningkatkan stabilitas bisnis mereka.

#### **2. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam bidang akuntansi keuangan dan akuntansi keperilakuan.